

PROSPEK PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KONTEKS ERA GLOBAL DAN MANAJEMEN PEMBIAYAANNYA

Ahmad Halid

Universitas Islam Jember

Email : khalidghunung@gmail.com

Abstrak: ini mengkaji hal yang menarik dari prospek pembelajaran dan pendidikan agama islam dalam konteks era global dan manajemen pembiayaannya. Penelitian ini adalah kajian pada kepustakaan yang memperkuat data penelitian dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar pendidikan. Model penelitian adalah kualitatif. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen kepustakaan. Pengecekan keabsahan data menggunakan hasil penelitian para ahli dengan mencocokkan dengan hasil penelitian ini. sehingga akan ditemukan penelitian versi ini dengan kuat. Kemudian akan dipertajam dengan analisis isi (konten analisis). Hasil penelitian adalah (1) Prospek Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional (2) Prospek Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Indonesia Di Era Globalisasi, (3) Prospek Pengembangan Imtak Dan Iptek Pada Jalur Pendidikan Madrasah Di Indonesia (4) Prospek Dan Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Di Masa Depan (5) Manajemen Pembiayaan Pendidikan Agama Dan Keagamaan

Kata Kunci: Pembelajaran; Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pembiayaan

PENDAHULUAN

Kata Globalisasi diambil dari kata Global yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition) sehingga tergantung dari sisi mana melihatnya¹ Di lain sisi, ada yang memandang globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini berarti globalisasi adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir.

Diluar dari pada itu, Penulis memberikan definisi globalisasi adalah budaya dunia yang mempunyai prinsip saling ketergantungan dari seluruh dunia dan masyarakat. Era global sering diberi makna "era kompetisi, era kebebasan, pasar bebas, era keterbukaan tanpa batas. Artinya setiap orang berhak berlomba-lomba dengan bebas memainkan dan menjalankan visi dan misinya serta ideologinya, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya antropologi, pendidikan dan sebagainya terkadang tanpa memper-timbangan kemaslahatan masyarakat.

Penyikapan era global berdasar pada semangat materialistik dan kapitalistik, sehingga seringkali menindas dan mengekang individu dan kelompok yang lemah dan miskin serta bodoh. Secara sepintas cocok ungkapan "yang kaya makin kaya" yang miskin makin miskin

¹<http://id.wikipedia.org/globalisasi>,20 Februari2009,21.16 WIB

" yang lemah makin lemah" yang kuat makin kuat" bagi era global. Akan tetapi bagi kaum muslim yang mempunyai ajaran yang sangat sakti, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits harus memainkan era globalisasi dengan berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi informatika serta yang terpenting didasari iman, takwa dan akhlaq yang mulia dalam arena kompetisi global sehingga nampaklah bahwa umat Islam membawa *rahmatan lil'alamin*.²

Tetapi sangat menyayangkan bahwa Bangsa dan Negara Indonesia sedikit sekali bahkan tidak ada yang memiliki semangat juang, semangat kapitalis, semangat materialistik, mereka terlena kepada harta bagi yang kaya, mereka sombong bagi dan ego bagi yang cerdas dan pandai, berani berlaku sok kuat di kandang sendiri, tapi ketika di kandang orang lain tidak bisa berbuat apa-apa alias keok dan penakut. Oleh karena itu, perlu ditatar Bangsa dan Negara Indonesia agar mempunyai daya saing tinggi dan sportif, berwawasan iptek serta materialistik dan religius.

Pendidikan agama Islam dan keagamaan sekarang dan kedepan bertujuan menghilangkan komersialisme dan kapitalisme serta meliterisme diganti dengan pola hidup yang humanis, sensitif, care, self regulation, pemikiran yang luas dan komprehensif serta mengedepankan nilai-nilai imtaq dan iptek sehingga mampu bersaing secara arif dalam dunia global dan pasar bebas.

Berdasar pada kutipan dalam kajian pustaka pada realitasnya banyak orang berpendapat bahwa bangsa dan negara Indonesia berorientasi mengejar uang saja (materi) demi kesenangan sesaat dan kesenangan dirinya bukan pada masyarakat. sesuai dengan perkataan Kinashita bahwa salah satu guru besar Universitas Waseda di Jepang menegaskan bahwa: Masyarakat Indonesia hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir demi kepentingan bersama. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia akan sulit bersaing dengan China dan negara-negara Asia lain dalam perbaikan investasi, pencaturan ekonomi, dan perdagangan global³.

Ungkapan itu sangat benar, objektif dan tercermin pada gaya kepemimpinan pemerintah Indonesia mulai dari tingkat Jakarta (pusat) sampai tingkat Desa. Mereka loyal dan condong pada kepentingan diri sendiri, partai dan sponsornya. Sedangkan rakyat ditindas, diperas sampai tidak berdaya bahkan mati kelaparan, kedinginan dan seterusnya. Yang sangat ironis adalah mereka yang duduk di Diknas dan Depag, sekolah dan Madrasah, menjadi pelaku, pemeran rakyat, korupsi dan sebagainya. Padahal institusi tersebut merupakan institusi yang paling mulia dan agung dibandingkan dengan institusi yang lain yang ada di dalam Negeri tercintai ini. Seharusnya lembaga tersebut dapat membe-rikan contoh pada lembaga-lembaga yang lain.

Oleh sebab loyal dan condong pada kekayaan sendiri, bangsa dan negara Indonesia akan menjadi korban era globalisasi, karena tidak mampu menyambut dan memainkan serta memenagkan pers-a-ingan global, sehingga yang didapat dan dirasakan sepanjang masa adalah dampak negatif era global, sedangkan dampak positif era global adalah sama sekali tidak pernah disentuh dan didapat bagi kehidupannya.

² Ahmad Halid, 2021. Kuliah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Jember. UIJ kyai Mojo, 23

³Kinashita dalam Kompas, 24 Mei 2002 hlm.D

Era global tidak membutuhkan kepicikan tenaga, energi dan kekuatan fisik semata. Tetapi ia membutuhkan tenaga yang profesional, proporsional, cerdas, tangkap dan kuat. Sebab arus globalisasi terus menerus menerjang dan mendobrak dengan keras, cepat, akurat, bahkan tidak toleransi, tidak kasihan, tidak tolong menolong bagi setiap sekmen kehidupan. Tetapi kondisi ini tergantung pada Bangsa dan Negara yang mengelola dan mengembangkannya.

Bagi kaum Muslim konsep global sudah terpatre di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul seperti "*fastabiqu al kbairaa*" (berlomba-lombalah dalam mencari kebaikan) dan "*kuntum kbaira ummatin*" (kamu semua umat muslim terbaik yang dilahirkan untuk manusia). Ayat ini di samping menjadi pedoman umat muslim, sekali gus menjadi motivator untuk menggerakkan segala potensi jiwa dan raga muslim Indonesia khususnya untuk memenangkan dan mengungguli segala macam persaingan dan perdagangan global.

Sekarang pertanyaanya adalah mampukah negara Indonesia mendidik dan menyiapkan rakyatnya untuk siap dan kuat jiwa dan raganya dalam memenangkan di galanggang pasar bebas tersebut? Jawabanya adalah hanya ada pada kata dan konteks pendidikan. Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, Tahun 2005 menegaskan bahwa Bangsa Inggris memiliki "*Three burning issues*" dalam menghadapi era globalisasi dalam abad 21 yaitu 1. Education, 2. Education 3. Education. Ini menunjukkan bahwa sangat penting pembangunan pendidikan untuk membangun bangsa dan negara.

Yang jelas, pendidikan Indonesia dan PAI pada khususnya, jika masih mempertahankan sistem lama dan pola kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dianggap tidak represen-tatif itu, dan tidak efektif, tidak efesien, tidak beorientasi pada siswa. maka tidak akan mampu mendidik dan menyiapkan bangsa dan negara Indonesia dalam mengungguli prestasi global.

Banyak pakar Indonesia yang menyimpulkan bahwa pendidikan di Indoneia dan PAI pada khususnya hanya menkankan pada satu sisi saja yaitu pada teori atau akhlak, dan spiritual saja secara terpisah, tidak ada usaha menyatukan keseimbangan antara teori dan peraktik, sehingga tidak dapat memper-dayakan dan mencerdaskan siswa.

M. Amin Abdullah mengkritik bahwa kegiatan pendidikan Islam yang selama ini berlangsung di sekolah menekankan pada:

1. Pendidikan islam lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata-mata serta amalan-amalan ibadah praktis
2. Pendidikan islam kurang consern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan kognitif menjadi menjadi "makna dan nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat berbagai cara media dan form
3. Pendidikan agama lebih menetik bertkan pada korespondensi tekstual yang lebih menekankan pada aspek hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada
4. Sistem evaluasi bentuk-bentuk soal agama islam menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan nilai dan makna spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.⁴

⁴Abdullah, A. M. 1998. *Problem Epistimologis-Metodologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm49-65

U.S. Al-Asyqar, yang dikutip oleh Ahmad Halid bahwa kelemahan umat Islam dan pendidikan Islam bahwa: Kaum muslimin telah menyia-nyiakkan ajaran agama merkea (Islam, pendidikan). Mereka telah keluar dari real-real agamanya dan telah menggantinya dengan peradaban dan adat istiadat nenek moyang atau filsafat dan isme-isme yang lain dan hasilnya tiada lain, melainkan timbulnya perpecahan, kelemahan dan kekalahan dalam bidang meliter dan pemikiran⁵.

Kemudian Komaruddin Hidayat menyatakan dengan jelas bahwa ketidaktepatan pendidikan agama Islam dapat diketahui melalui tiga indikator yaitu:

1. Pendidikan islam saat ini orientasi kurikulumnya lebih pada belajar agama sehingga outputnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran islam, tetapi prilakunya tidak relevan dengan nilai –nilai ajaran islam yang diketahuinya
2. Tidak tertibnya penyusunan dan pemilihan materi–materi pendidikan islam sehingga sering ditemukan prinsip-prinsip yang mestinya dipelajari lebih awal tetapi terlewatkan
3. Kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam kurangnya penguasaan sematik dan generik atau istilah-istilah kunci dean pokok ajaran islam yang menyebabkan penjelasan yang sangat jauh dan berbeda dan makna spirit dan konteksnya⁶.

Kalau memang benar apa yang dikatakan pakar tersebut tentang keberadaan pendidikan Islam di Indonesia, maka peserta didiknya (umat islam) tidak akan mampu mengungguli prestasi persaingan bebas lintas lokal dan global. Agar Pendidikan Agama Islam mampu mendidik dan menyiapkan peserta didiknya dalam mengungguli prestasi persaingan bebas lintas lokal dan global, maka sistem pendidikan agama Islam harus:

Pertama UU sisdiknas berorientasi pada pembelajaran alam luas dan bebas untuk mencari informasi yang luas, tepat dan akurat, *Kedua* Masyarakat menggalakkan hubungan pendidikan putra-putrinya dengan pesantren murni yang dikelola dengan profesional dan proporsional, karena pesantren tersebut mengedepankan pada perkembangan, kecer-dasan, ketanggihan dan pengujian anak didik.

Ketiga Masyarakat bersama-sama mencoba menjauhkan putra-putrinya dari Sisdiknas dan Depag karena mengedepankan uang dan jabatan, mengesampingkan proses perubahan positif peserta didik. Sehingga dengan cara ke 2 dan ke 3 tersebut dapat membunuh dikotomi pendidikan sampai pada keakar-akarnya bahkan pelaku sisdiknas dan depag dapat dimanusiakan, *Keempat* Prioritaskan pendidikan pada pemba-ngunan dan peningkatan iman, taqwa, akhlaq, penguasaan ilmu dan teknologi, menyalehkan amaliyah, seiramakan teori dan praktik.

Keempat hal itu, menjadi kebaruan penelitian ini yang sangat menarik untuk diteliti secara serius. Oleh karena itu, maslaha penelitian ini adalah **Bagaimana Prospek Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Dalam Konteks Era Global Dan Manajemen Pembiayaannya?**

⁵ Ahmad Halid, 2012. *Prospek Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan (Analisis Terhadap UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003)*. Jember. UIJ Kyai Mojo

⁶Komaruddin Hidayat. 1999. *Memetakan Kembali struktur Keilmuan Islam*. Jakarta: Logos.hlmxii-xiii

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kajian pada kepustakaan yang memperkuat data penelitian dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar pendidikan. Model penelitian adalah kualitatif. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumen kepustakaan. Pengecekan keabsahan data menggunakan hasil penelitian para ahli dengan mencocokkan dengan hasil penelitian ini. sehingga akan ditemukan penelitian versi ini dengan kuat. Kemudian akan dipertajam dengan analisis isi (konten analisis).

KAJIAN TEORI

Prospek Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional

Pendidikan agama Islam salah satu pemicu terjadinya perivisian undang-undang pendidikan dan SKB 3 Mentri Tahun 1975 dan UU N0 2 Tahun 1989 sampai pada lahirnya UU N0 20 Tahun 2003 memperlmasalahakan demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah.

Masyarakat mengklaim pemerintah telah berlaku otoriter dan hegemoni terhadap pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat dan Yayasan, sehingga masyarakat menggagap pemerintah telah menghadang dan mendiskreditkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pendidikan. Karena itu, Halim Soebahar berpendapat bahwa usaha pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dalam UU N0 20 Tahun 2003 kurang lebih dua hal:

Pertama pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa selain akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Kedua sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.⁷

Arah pandang pemerintah dalam memperbaiki UU tentang pendidikan mengkonsentrasikan pada peningkatan dan pengembangan pada setiap terjang pendidikan Nasional Indonesia. Kata lain adalah lulusan pendidikan Nasional Indonesia mempunyai kompetensi keseimbangan yang sama dalam kehidupan mental, spiritual dengan fisik, material, duniawi dan ukrawi, teori dan praktik.

Oleh karena itu, pada tanggal 11 Juni Tahun 2003 disahkan dan di undangkan pada tanggal 8 Juli 2003. proses untuk di undagkannya UU N0 20 Tahun 2003 tersebut tidak berjalan dengan mulus tetapi masih diwarnai pembantahan yang luar bisa di gedung DPR RI terjadi pro dan kontra yang luar biasa. Pro dan kontra tersebut membutuhkan waktu dan menguras tenaga dan pikiran untuk mencapai kesepakatan. Bukti ketidaksepakatan penandatanganan UU N0 20 Tahun 2003 tersebut adalah terjadinya penundaan-penundaan, awalnya bersepakat untuk disahkan pada 20 Mei 2003, tertunda, direncanakan lagi pada

⁷Soebahar, H.A. 2005. *Matrik Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Pustaka Marwa.hlm.26

tanggal 10 Juni 2003 tertunda lagi. Akhirnya baru disahkan pada tanggal 11 Juni Tahun 2003 dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2003 salah satu contoh pemicu pro dan kontra Anggota Dewan pada pasal 37 tentang kurikulum pendidikan Nasional. Halim Soebahar mengutip pendapat Purohito:

Mereka yang kontra menilai pasal tersebut tidak memperhatikan pluralitas atau keberagaman. Perdebatan pasal 12 ayat 1 huruf a, tentang hak anak didik dalam pendidikan agama, sebenarnya bukan semata-mata pro dan kontra isi pasal tersebut. Masyarakat tidak mengerti asal usul isi pasal itu sehingga muncul reaksi penolakan. Analisis saya penyusunan pasal itu, mengabaikan tentang aturan-aturan agama yang sudah berlaku sebelumnya. Bahkan ada satu hal yang membuat masyarakat bingung yakni pengakuan terhadap pendidikan diluar sekolah yang dianggap setara dengan pendidikan formal. Sementara yang kontra mempertanyakan apa yang salah dalam pasal itu? Sebenarnya merupakan suatu yang wajar jika peserta didik mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya.⁸

Berdasarkan kutipan pro dan kontra tersebut sebagai garis tengah adalah mem-berikan kebebasan kepada para penyelenggara satuan pendidikan dalam mengatur kurikulum satuan pendidikan dalam bidang agama. Bagi penulis berpendapat bahwa: *Pertama* mereka yang kontra dengan pasal tersebut adalah putusan politik komonis yang tidak memandang bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius bukan komonis yang anti agama.

Kedua mereka yang menolak justru anti pluralisme, karena pendidika agama dan keagamaan di masyarakat merupakan usaha untuk mengantisipasi terjadinya paham pragmatis pendidikan. *Ketiga* pendidika agama dan keagamaan memberikan kebebasan kepada para penganut agama melaksanakan pendidikan sesuai dengan agamanya masing-masing. *Keempat* mereka yang kontra bermaksud untuk memaksakan agamanya kepada orang yang lain agama

Terlepas dari prokontra tersebut, menurut peneliti pemerintah dan masyarakat harus sepakat dalam tiga hal yaitu Otonomi Daerah atau pendidikan, Peningkatan daya saing dan peningkatan Keimanan dan Ketakwaan. Ketiga ini, jika ditata dengan baik dan disiplin maka rakyat dan Negara Indonesia dalam jangka 5 tahun dapat mengungguli prestasi dengan negara-negara tetangga bahkan negara maju dunia. Penentuan Negara maju atau Negara berkembang merujuk pada keberhasilan pendidikan dalam menguasai sainteach, peradaban manusia, dan tatakkerja yang disikapi dengan kesungguhan dan keimanan serta moralitas.

Jadi pendidikan agama Islam merupakan salah satu jenis pendidikan yang sangat berperan aktif dalam meningkatkan SDM dan SDA karena pendidikan agama mengintegrasikan iptek dan imtaq dan akhlak mulia. Inilah yang dikehendaki oleh sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, maka pendidikan agama Islam dan keagamaan mengintegrasikan materi agama dan umum. Disamping itu, Pendidikan agama Islam dan keagamaan membuka kotak saran dan kritikan konstruktif seluas-luasnya dari berbagai masyarakat, golongan dan organisasi untuk membangun dan mengembangkan sepak terjang (prospek) pergumulan pendidikan. Saran dan kritikan yang bersifat konstruktif datang dari pakar pendidikan bahwa:

⁸Soebahar, H.A. 2005. *Matrik Pendidikan Islam*. Jogyakarta: Pustaka Marwa. hlm.28

1. Gunakan tenaga-tenaga yang cakap, berbakat dan memiliki komitmen yang tinggi atau mencintai madrasah. Optimalkan kerjanya melalui bakat, ilmu dan keterampilan dengan tradisi kerja yang penuh disiplin dan tanggung jawab
2. Budayakan mereka (SDM) sebrutal apapun kesulitan dan tantangan kerja dan seberat apapun bahaya yang menghadang tanpa menyerah.
3. Gunakan konsep unggul yang dimaksud diatas dengan kesabaran dan kepentingan madrasah di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
4. Tegakkan budaya disiplin kerja dan kebersamaan
5. Terus tingkatkan pembaharuan teknologi dan sistem kerja semakin efektif dan efisien.⁹

Kritikan konsep aktual tersebut, marupa-kan usaha sinergi dalam perkembangan pendidikan agama Islam ke depan. Dengan demikian, pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam dan keagamaan lebih mengedepankan pendidikan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, ilmu dan teknologi dan meyalihkan segala macam perbuatan (amal, tindakan). Sejalan dengan pandangan Ki Supriyoga bahwa pengembangan ilmu dan teknologi merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh agama.¹

Oleh karena itu, pendidikan agama Islam dan keagamaan sangat sensitif dan mewajibkan kepada umatnya untuk belajar berbagai macam ilmu dan teknologi dan diikat dengan imtaq. Hal ini secara otomatis kontribusi yang sangat besar bagi pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional Indonesia, sampai detik ini hal ini menjadi kelemahan sistem pendidikan nasional dan hanya menjadi keunggulan sistem pendidikan agama Islam. Pendidikan umum perlu mencontohnya.

Prospek Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Indonesia Di Era Globalisasi

Mastuhu membagi era globalisasi menjadi dua *rounde* yaitu *rounde pertama* dunia dipetakan menurut kekuatan ideologi politik dan kekuasaan yaitu ke dalam kekuatan dua super power Amerika Serikat dan Union Of Soviet. *Rounde kedua* dipetakan menurut kekuatan *science and technology*¹.

Ronde pertama dan kedua tersebut, sangat sulit Indonesia ikut berperan serta dalam rangka mendesain dan mengolah agar sesuai dengan misi kemanusiaan dan berguna bagi semua negara baik Negara yang maju, berkembang dan tertinggal. Satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Negara Indonesia di era global adalah memerankan kekuatan ideologi politik kekuasaan dan *science and technology* lewat jalur ideologi Islam dan pendidikan agama Islam. Dengan demikian Indonesia dan institusi pendidikan Islam menjadi hebat dalam memberikan kontribusi dan mamfaat politik, sains dan teknologi bagi perkembangan dunia.

Oleh karena itulah pemerintah membuat keputusan yang dikenal dengan istilah SKB 3 Menteri mengevaluasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang pendidikan

⁹Mastuhu. 2006. *Revitalisasi Madrasah*. PPABLD. Hlm.91-92

¹ Ki Supriyoga. 2007. *Revitalisasi Madrasah "Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Pada Madrasah Di Indonesia*. Jakarta: PPAK Depag RI.hlm 105

¹ Mastuhu. 2006. *Revitalisasi Madrasah*. PPABLD.hlm67

nasional harus disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia yang ramah dan religious. Langkah ini menghasilkan pendidikan nasional yang mengedepankan pendidikan agama dan moral tentu tidak mengabaikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka merealisasikan konsep pendidikan agama dan moral tersebut, pemerintah bekerja sama dan memberikan hak kepada daerah-daerah, kepala sekolah, guru dan masyarakat atau simpatisan pendidikan bersama-sama mengarahkan pikirannya untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Sehingga banyak masyarakat dan ilmuwan Indonesia berhasil memberikan konsep pendidikan Islam yang diambil dari sejarah yang lalu dan masa yang akan datang. Pada penglihatan sejarah yang lalu, bermaksud melihat ilmuwan muslim, para filsuf, para kiyai, ulama, guru, tekat masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mereka memiliki sikap positif terhadap iptek barat dan tidak membedakan mana ilmu islami dan ilmu non islami. Muzayyin Arifin menjelaskan bahwa: Para ilmuwan dan ulama masa itu secara antusias mentransfer iptek dari luar yang kemudian dikembangkan menjadi iptek yang islami. Mereka mampu mengislamkan iptek yang nonislam itu, berkat kecerdasan dan kreatifitas tinggi yang dimotivasi oleh ajaran al-qur'an serta daya selektifitas terhadap jenis-jenis iptek dari luar sehingga bentuk iptek yang membahayakan akidah keimanan ditinggalkan oleh mereka¹.

2

Kutipan ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia harus integrative antara iman dan ilmu pengetahuan, teknologi. Pandangan kedepan maksudnya umat Islam mampu mengantisipasi iptek modern serta menjadi pencipta iptek yang menkonfigurasi nilai-nilai ajaran Islam yang akomodasi terhadap kepentingan iptek, budaya, politik, sosial, industri modern. Sehingga kemajuan iptek tersebut tidak akan pernah terjadi diskriminasi dan kompartementalisasi. Untuk itulah pendidikan agama Islam dipelajari dan mengajari siswa (manusia) di Madrasah, Masjid, Musholla, Majelis Taklim untuk dapat menghadapi tantangan berat era globalisasi. Kemajuan iptek dan peradaban manusia modern tidak akan membahayakan pada alam dan diri manusia itu sendiri, karena pendidikan agama Islam telah memperkenalkan konsep Qur'ani dan mengajarnya untuk selalu dipraktikkan dalam semua aktifitas manusia.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

PROSPEK PENGEMBANGAN IMTAK DAN IPTEK PADA JALUR PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA

Semua ulama dan golongan pembaharu muslim sepakat kemajuan umat Islam ditandai satu perkara yaitu umat Islam memahami ajaran Islam dengan tepat dan benar serta mengamalkan dengan baik dan benar juga. Persoalan iptek dan apa saja pengetahuan sudah terangkum dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena dalam rangka pengembangan iptek pada sekolah keislaman adalah memahami al-qur'an dan hadis secara komprehensif tidak parsial.

Dengan demikian, maka hanyalah pendidikan agama Islam yang dapat mengantarkan tujuan manusia sukses menguasai iptek dan imtaq, akan tetapi secara umum pendidikan agama Islam dan

¹ Muzayyin Arifin.2007. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.hlm.51

keagamaan (Madrasah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah) dalam mengembangkan imtak dan iptek menurut Mastuhu ada dua persoalan yaitu persoalan internal dan eksternal. Persoalan atau tantangan-tantangan tersebut harus dicari solusinya agar pendidikan madrasah dapat menjadikan lulusannya mampu berperan aktif dimasyarakat dengan membawa misi agama dan ilmu pengetahuan¹

3

Dalam hal ini Muhaimin memberikan tanggapan cerdas mengenai kelemahan-kelemahan pada madrasah sebagai berikut:

1. Memperbaiki paradikma pendidikan yang lebih bersifat sistemik atau integrative.
2. Memperbaiki model dan strategi inovasi pendidikan yang lebih bersifat *bottom up*.
3. Memperbaiki ukuran keberhasilan pendidikan atau perbaikan paradigma keberhasilan pendidikan yang bukan hanya menekankan pada ranah kognitif, tetapi sekaligus ranah afektif dan psikomotorik.
4. Penetapan peraturan yang relative ketat dalam penetapan kenaikan kelas atau pelulusan studi dan dalam pemberian gelar akademik.
5. Desentralisasi dan otonomi pendidikan yang konsisten.
6. Perbaikan kesejahteraan guru¹

4

Tampaknya pendapat tersebut menekankan pada perbaikan sistem pendidikan madrasah dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan agama Islam yang dikelola dan dikembangkan oleh tenaga edukatif yang profesional. Relevan dengan pendapat M. Bukhari bahwa:

Pendidikan Islam supaya dikembangkan dengan tiga sistem kemampuan sebagai berikut:

1. kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan
2. Kemampuan gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang berjalan
3. Kemampuan menyusun program-program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam jangka tertentu¹ .

5

Sistem pendidikan yang diuraikan beberapa pendapat tersebut, sudah diterapkan dengan baik oleh pendidikan agama Islam dan keagamaan, namun tinggal menunggu hasilnya dan secara teori pendidikan tersebut akan melahirkan lulusan yang menguasai iptek dan imtaq. Disadari bahwa penguatan pada imtak masih sangat lemah. Hal ini ditandai kurang keseriusan pihak pemerintah dan sekolah untuk mengembangkan iptek di sekolah, sebab lemahnya SDM yang menguasai teknologi modern, minimnya anggaran pengembangan teknologi, guru lemah penguasaan reset teknologi. Tetapi kedepan sekolah kita akan bangkit, pemerintah memulai anggaran pendidikan lebih ditigkatkan bahkan calon guru sudah diberikan beasiswa dalam negeri dan luar negeri.

PROSPEK DAN EKSISTENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEAGAMAAN DI MASA DEPAN

¹ Mastuhu.2003. *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Saviria: Insaniyah Press.hlm.9

¹ Muhaimin. 2006. *Nuansa baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia* Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hlm.99-100

¹ M. Bukhari, 2007;10

5

Kemajuan manusia, dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama kemajuan dari segi iptek dan yang kedua dari segi imtak. Dua sisi kemajuan tersebut, merupakan aset kekayaan Islam terdapat dalam sumber aslinya (al-qur'an, hadis) yang tak terbentahkan, telah mengatur segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi dan tatacara beriman, berinteraksi dengan sesamanya. Teori tersebut, bisa dikuasai manusia dengan baik dan benar apabila dipelajari dengan tekun, rasional dan irasional, maka akan menemukan pengetahuan Islami yang tidak ada bandingannya diberbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek agama, iptek, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, seni, budaya dan seterusnya. Berbagai aspek tersebut perlu dipahami dengan tulus (tidak benci Islam) dan komprehensif tidak parsial

Dorongan itulah yang membuat SKB 3 Menteri dan UU RI N0 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah bahwa pendidikan agama Islam ke depan harus menjadi prioritas umat, masyarakat, siswa, karena hanya dengan pendidikan agama Islam manusia dunia dan Indonesia dapat berdiri tegak dan berkeunggulan (*exceleance*) pada kemajuan peradaban (iptek), religious, manivesto politik, budaya, sosial dan ekonomi. Karena pendidikan agama Islam di samping berusaha meng-internalisasikan nilai-nilai ajaran agama (islam) juga berusaha keras untuk menumbuhkan ketangkasan peserta didik dalam berfikir rasional dan supra rasional, tatacara beretika, kedisiplinan kerja, kualitas kerja, bisnis, usaha, kreatif, inovativ dan sebagainya.

Prospek dan eksistensi pendidikan agama Islam dan keagamaan ke depan semakin maju dan menjadi pilihan siswa, karena pendidikan agama Islam telah dikembangkan oleh Sarjana lulusan S1, S2 dan S3 sampai Profesor. mereka memiliki 8 kompetensi yang harus dikuasai seperti yang dijelaskan Mastuhu bahwa:

1. Kemampuan memahami makna pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan mengembangkan tafsirnya sesuai dengan tantangan zaman tanpa mengurai nilai esensinya
2. Mampu menangkap makna perubahan dan pemikiran paradoxal dan mampu main di dalamnya tanpa tertawa oleh arus perubahan atau tenggalam dalam paradoxal atau tanpa didekte oleh perubahan atau paradoxal
3. Kemampuan memprediksi apa yang bakal terjadi
4. Kemampuan membuat definisi sendiri atau kemampuan berorientasi sesuai dengan perubahan dan tantangan zamannya
5. Kemampuan memilih dan memilah yang benar
6. Kemampuan memilih dan menjemput pola serta tempat bola
7. Kemampuan mengelola bola¹

Kedelapan kompetensi tersebut dapat semakin baik ketika dikombinasikan dengan kempetensi kcerdasan komplit yaitu kecerdasan intelektual question (IQ), emosional question (EQ), spiritual question (SQ), dan religion question (RQ). Pendidikan agama Islam teori tersebut menjadi rujukan dalam setiap pelaksanaan aktifitas pendidikan dan pembelajaran. Hal ini menjadi investasi yang sangat besar Pendidikan Islam terhadap perkembangan peradaban manusia masa yang akan datang. Dengan demikian maka pendidikan ini menjadi eksis, tepat dan tumpuan harapan siswa (masyarakat) dalam meraih cita-cita hidupnya.

¹ Mastuhu.2003. *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Saviria: Insaniyah Press.95-96

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Manajemen Pendidikan

Sesungguhnya manajemen pendidikan sangat dibutuhkan untuk memajukan sekolah dan warga belajar, namun pihak pemerintah kurang peduli pada disiplin ilmu manajemen pendidikan. Ketidakpedulian dan ketidakseriusan pemerintah mengembangkan manajemen sekolah dapat ditelaah pada pasal 39 UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003:

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Berdasarkan pasal 39 tersebut bahwa manajemen pendidikan di Indonesia dasarnya masih sangat minim sebagai landasan pengembangan pendidikan. Padahal manajemen pendidikan itu sangat urgensi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang efektif dan efisien.

Pada pasal 39 UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003 sangat sempit dalam memaknai manajemen pendidikan, menurutnya manajemen pendidikan itu hanya sekedar (1) kegiatan administrasi pendidikan, (2) pengelolaan pendidikan, (3) pengembangan, (4) pengawasan, dan (5) pelayanan teknis. karena itu, butuh peraturan menteri yang bisa mengembangkan manajemen pendidikan Indonesia.

Penjelasannya pun pasal 39 UU SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003 masih sangat sempit yaitu “tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar”. Manajemen pendidikan dalam penjelasannya tersebut tidak mengembangkan manajemen pada unsur kepemimpinan pendidikan, budaya pendidikan, pengelolaan pendidikan secara modern, Sumber daya manusia, sumber daya alam, tidak menjelaskan sistem perencanaan, pelaksanaan dan sistem evaluasi yang baik. Juga terkesan pengaburan makna administrasi dan makna manajemen.

Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan pendidikan agama dan keagamaan berdasar pada sila kelima pancasila “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” menunjukkan bahwa setiap warga Indonesia wajib mendapatkan keadilan “pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan” dan seterusnya.

Jadi dalam konteks pembiayaan pendidikan, semua warga Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak dan dibantu oleh Negara secara adil sesuai dengan keadaan dan tuntutan.

Pembiayaan pendidikan formal sudah sangat jelas telah dibiayai oleh Negara baik yang meyangkut sarana prasarana dan guru-gurunya dijamin kesejahteraan hidupnya dan keluarganya. Sedangkan guru-guru pendidikan informal dan non formal belum mendapatkan bantuan yang layak dari Negara, hanya guru ngaji mendapatkan tunjangan pokok Rp 800.000 setiap tahunnya dari daerah atau Kabupaten, itupun tidak merata atau tidak semua guru ngaji mendapatkan tunjangan tersebut. Jumlah yang sangat tidak adil bagi guru-guru agama non formal, karena tidak ada gaji bulanan dan tunjangan hidup setiap bulannya.

Manajemen pembiayaan pada pendidikan informal dan non formal secara tegas tidak disebutkan dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, namun berlaku secara umum berikut pasal tentang pembiayaan pendidikan yang dapat dirujuk untuk pengembangan pendidikan: *Pertama:* manajemen pembiayaan pendidikan keagamaan didasarkan pada sikap dan tanggung jawab pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan secara merata dan berkeadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 berikut:

- (1)Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3)Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Kedua: manajemen pembiayaan pendidikan keagamaan juga berdasar pada Sumber Pendanaan Pendidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 47 sebagai berikut

- (1)Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2)Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3)Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketiga: merujuk pada manajemen pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan Pasal 48 berikut:

- (1)Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2)Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Keempat: manajemen pembiayaan pendidikan keagamaan berdasar pada sistem Pengalokasian Dana Pendidikan sebagaimana Pasal 49 UUsisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut:

- (1)Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2)Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Manajemen Sarana Prasarana

Manajemen sarana prasarana pendidikan keagamaan sama halnya dengan pembiayaan sarana pendidikan formal. Hal ini dapat merujuk pada sistem sarana prasarana pendidikan formal pasal 45 sebagai berikut:

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45 UU sisdiknas No 20 Tahun 2003 tersebut belum dirasakan oleh penyelenggara pendidikan keagamaan di Masyarakat. Hal demikian kurangnya sosialisasi pemerintah dengan pihak pelaksana pendidikan keagamaan sehingga tidak memenuhi kriteria atau standar pengelolannya yang kemudian juga menyebabkan tidak layak untuk mendapatkan bantuan dari Negara.

KESIMPULAN

Pendidikan agama Islam dan keagamaan sekarang dan kedepan bertujuan menghilangkan komersialisme dan kapitalisme serta meliterisme diganti dengan pola hidup yang humanis, sensitif, care, self regulation, pemikiran yang luas dan komprehensif serta mengedepankan nilai-nilai imtaq dan iptek sehingga mampu bersaing secara arif dalam dunia global dan pasar bebas. Hasil penelitian adalah (1) Prospek Pendidikan Agama Islam dan Keagamaan Sebagai Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional (2) Prospek Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Indonesia Di Era Globalisasi, (3) Prospek Pengembangan Imtak Dan Iptek Pada Jalur Pendidikan Madrasah Di Indonesia (4) Prospek Dan Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dan Keagamaan Di Masa Depan (5) Manajemen Pembiayaan Pendidikan Agama Dan Keagamaan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggia Ayu Lestari, Erik, 2017, Penggunaan Metode Bernyanyi Terhadap Peningkatan Kosakata Bahasa Inggris, Jurnal Pelita Paud, Vol 4, no. 2.
- Abdullah, A. M. 1998. Problem Epistimologis Metodologis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- AG. Muhaimin. 2007. Revitalisasi Madrasah. Jakarta: Depag RI.
- Al-Abrasyi, A.M. Tt. Ruhut At-Tarbiyah Wa At-Ta'lim. Darul Ulum.
- Arifin, M. 2007. Kapita Selektta Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S, 2006. Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineca Cipta.

- Azra, A. 2000. Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernis Menuju Millennium Baru. Jakarta: logos wacana ilmu.
- Badawiy, A.Z. 1980. Mukjam Mushtholahat at-Tarbiyah Wa at-Taklim (Injliziy – Faransiy – ‘Arobiy). Dar al-Fikri al-‘Arobiy.
- Depag RI, 2006. PP RI N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.
- Depag RI, 2006. PP RI N0 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.
- Depag RI, 2006. UU RI N0 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI
- Depag RI, 2006. UU RI N0 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.
- Drajat. Z. 1995. Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah. Bandung: Ruhama.
- Fajar, M. 1998. Madrasah Dan Tantangan Modernitas. Bandung: Mizan.
- Fauzi, I dan Anwar, M. 5 Mei 2010. Gubernur Jawa Timur, Angkat Madrasah Diniyah. Surya. Hlm.12
- Hamim, N. 2008. Pengembangan Kurikulum Pendidikan. Surabaya: TP (tampa penerbit).
- Hasbullah. 1997. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Umum Dan agama Islam). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, K. 1999. Memitakan Kembali struktur Keilmuan Islam. Jakarta: Logos.
- Ihsan, F. 2003. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ki Supriyoga. 2007. Revitalisasi Madrasah ”Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Pada Madrasah Di Indonesia. Jakarta: PPAK Depag RI.
- Kutha, R.N. 2004. Teori, Metode Dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma’arif, S.. 2007. Revitalisasi Pendidikan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maksum. 1999. Madrasah Dan Sejarah Perkembangannya. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mastuhu. 1994. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS.
- Mastuhu. 2003. Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21. Saviria: Insaniyah Press.
- Mastuhu. 2006. Revitalisasi Madrasah. PPABLD.
- Moleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2006. Nuansa baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhajir, N.. 1993. Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan. Yogyakarta: Reka Sarasin.
- Nasir, R. 2005. Mencari tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah arus Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, A. 2002. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Poerdaminta, 1987. Kamus Ilmiah Popular Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosyadi, K. 2004. Pendidikan Profetik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Semiawan, R. C. 2002. Pendidikan Keluarga Dalam Era Global. Jakarta:PT Prenhallindo.
- Soebahar, H.A. 2005. Matrik Pendidikan Islam. Jogjakarta: Pustaka Marwa.
- Sohib, M. 1998. Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Surakhmat, W. 1980. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rinneka Cipta.
- Tim Penyusun IAIN, 2002. Pengantar Studi Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Tim Kemendikbud. UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Jakarta
- Tim. UUD 1945. 2005. Hasil Amandemin RI. Jakarta: Abdi Periw.